

Pembukaan Konsulat Jenderal Australia di Makassar Sebagai Upaya Mempererat Hubungan Kerjasama Australia dengan Indonesia Bagian Timur

Sevy Annesa Putri

Darwis

Pusparida Syahdan

sevyannesaputri@gmail.com

*Department of International Relations, Hasanuddin University
Makassar, Indonesia*

ABSTRACT

This research aims to describe the prospect of bilateral relationship between Australia and Eastern Indonesia through the existence of Australian Consulate-General in Makassar. Specifically, this research aims to know (1) the background of the opening of Australian Consulate-General in Makassar and (2) the role of Australian Consulate-General in Makassar to establish relationship with Eastern Indonesia. The method of this research is qualitative descriptive which describes the prospect of the opening of Australian Consulate-General in Makassar to strengthen its relationship with Eastern Indonesia. The data collection method used by the author is library research sourced from many literatures such as books, journals, documents, articles, and other medias such as internet, newspapers, and magazines, also use interview method to the Consul-General of Australian Consulate-General in Makassar.

The result of this research shows that as a neighbour-state, Australia in its commitment to strengthen good relations with Indonesia should increase and escalate their performance of improving its cooperation between both countries to be more intense and tight by not only touch the center of Indonesia itself but also have to reach other parts of Indonesia as well as Eastern Indonesia. A lot of promotion that related to culture, education, and tourism of the Australian itself and also many programs have been planned and done by the Australian Consulate-General in Makassar with provincial government in Eastern Indonesia in order to reinforce its relationship between both countries.

Key words: Australian Consulate-General; Eastern Indonesia; Makassar; Bilateral Relations

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan prospek hubungan kerja sama bilateral Australia dengan Indonesia bagian timur melalui keberadaan Konsulat Jenderal Australia di Makassar. Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) latar belakang pembukaan Konsulat Jenderal Australia di Makassar dan (2) peranan Konsulat Jenderal Australia di Makassar dalam menjalin hubungan kerja sama dengan Indonesia bagian timur. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah kualitatif deskriptif yang akan menjelaskan bagaimana prospek pembukaan Konsulat Jenderal Australia di Makassar dalam rangka kerjasama dengan Indonesia bagian timur. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah telaah pustaka yang bersumber dari buku, jurnal, dokumen, artikel, serta dari berbagai media lainnya seperti internet, majalah ataupun surat kabar harian, dan juga metode wawancara yang dilakukan kepada Perwakilan Konsuler Konsulat Jenderal Australia di Makassar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagai negara tetangga, Australia dalam komitmennya untuk menjalin hubungan baik dengan Indonesia perlu meningkatkan hubungan kerja sama yang lebih intens dan tidak hanya berpusat di kawasan ibukota saja, akan tetapi juga di Kawasan Timur Indonesia yang masih perlu pengembangan.

Berbagai promosi budaya, pendidikan, pariwisata, serta program-program telah dicanangkan dan dilakukan oleh Konsulat Jenderal Australia di Makassar bersama dengan pemerintah provinsi di Kawasan Timur Indonesia untuk semakin mempererat hubungan bilateral kedua negara tersebut.

Kata kunci: Konsulat Jenderal Australia; Kawasan Timur Indonesia; Makassar; Hubungan Bilateral

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari beragam suku, bangsa, bahasa, budaya, dan wilayah. Dengan lokasi geografis yang diapit oleh Benua Asia dan Australia serta Samudera Hindia dan Pasifik, posisi Indonesia dinilai strategis dalam melakukan perdagangan dunia. Indonesia telah menjadi relasi yang baik bagi negara-negara tetangganya, terutama bagi Australia. Indonesia menjadi negara tetangga terdekat bagi negeri kanguru tersebut. Hubungan antara kedua negara ini mempunyai sejarah yang panjang. Persamaan antara hewan dan tanaman yang ada di Australia, Irian Jaya, Nusa Tenggara dan Sulawesi merupakan bukti adanya hubungan tersebut. Juga terdapat hubungan sosial dan budaya. Cerita mengenai hubungan ini sudah lama dimulai dalam sejarah manusia. Namun sulit untuk mengatakan kapan tepatnya hubungan antara Australia-Indonesia itu dimulai.

Kerjasama antarnegara tersebut dapat diterjemahkan ke dalam beberapa bentuk, salah satunya adalah kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral antarnegara terbagi ke dalam beberapa bagian, seperti dalam bidang ekonomi, politik, maupun budaya. Ketika suatu negara telah mengakui kedaulatan negara lain, maka ia akan mencoba untuk membangun hubungan diplomatik dengan negara tersebut. Selanjutnya, mereka akan melakukan pertukaran diplomat sebagai perwakilan dari masing-masing negara untuk memfasilitasi dialog dan kerjasama yang akan dilakukan oleh negara bersangkutan. Menurut Krisna (1993, hal. 18), hubungan bilateral merupakan keadaan yang menggambarkan adanya hubungan yang saling mempengaruhi atau adanya hubungan timbal balik diantara kedua belah pihak atau didalam kedua negara. Keuntungan timbal balik yang demikian jika hasil positif lebih didominasi maka akan terjadi tindakan saling ketergantungan (interdependensi) yang akan mengakibatkan kerjasama berlangsung dalam kurun waktu yang lama.

Makassar merupakan ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan yang dinilai sebagai pintu gerbang utama kawasan timur Indonesia. Suku Bugis dan Makassar sebagai komunitas etnis yang saling bertalian merupakan kesatria-kesatria hebat dari Sulawesi Selatan. Mereka merupakan pedagang penguasa lautan andal yang menjual budak, emas, rempah, bahan makanan, dan produk-produk lokal lainnya. Sebelum awal abad ke-17, sejumlah negara kecil telah memperebutkan hegemoni atas wilayah ini (M.G. Rickleefs, 2013, hal. 250).

Tercatat sejak tahun 1650, para nelayan Bugis dan Makassar mulai berlayar ke perairan Australia sebelah utara. Mereka berburu teripang untuk dibawa kembali ke Sulawesi kemudian diekspor ke China. Banyak suku Aborigin yang terdapat di Australia bekerja untuk para nelayan Bugis Makassar tersebut. Mereka juga mempelajari budaya, bahasa, dan kebiasaan orang Bugis Makassar. Bahkan ketika orang-orang Bugis Makassar tersebut berlayar ke Australia, sebagian dari mereka ada yang ikut ke Sulawesi dan kembali ke Australia pada musim berikutnya, namun ada juga yang menetap di Sulawesi.

Hubungan antara Indonesia dan Australia terus berkembang dengan berbagai dinamika yang terjadi antara keduanya. Pada tahun 1790, kapal pertama Indonesia datang di Sydney dari Batavia dengan membawa daging sapi, daging babi, tepung, gula, dan beras. Tahun 1945 ketika Indonesia menyatakan kemerdekaannya, serikat buruh di Australia berkampanye dalam menekan pemerintah Australia untuk mendukung kemerdekaan Indonesia saat itu. Australia pun menjadi salah satu diantara negara-negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Tahun 1962, Australia mulai mengakui Irian Jaya sebagai bagian dari Indonesia—yang sebelumnya Australia berpihak kepada Belanda. Memasuki tahun 1963 - 1965 ketika terjadi konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia, Australia berada di pihak Malaysia karena mereka mengkhawatirkan keberadaan komunisme di Indonesia. Tentara

Australia bahkan ikut berperang dengan tentara Indonesia kala itu di Borneo. Namun, masalah tersebut di atas terpecahkan dengan adanya kudeta yang gagal di Indonesia pada tahun 1965, dan dengan diangkatnya Presiden Soeharto sebagai pemimpin. Sesudah tahun 1965 hubungan antara Australia-Indonesia mulai berkembang lagi, dan menjelang tahun 1967 Australia memberikan dana bantuan untuk membantu membangun kembali ekonomi Indonesia (Australia Indonesia Institute, 2016).

Hubungan diplomatik Indonesia dan Australia dimulai pada tahun 1949 dan pada tanggal 17 Maret 1950, Indonesia membuka hubungan diplomatik secara penuh dengan menunjuk Dr. Oesman Sastroamidjojo sebagai kuasa usaha sementara yang menempati Gedung Arsip Nasional di Canberra dan kemudian pada tanggal 5 Juli 1950 digantikan oleh Oetoyo Ramelan sebagai duta besar penuh. Sebelum menetap di daerah Yarramlula (daerah lingkungan perwakilan- perwakilan asing di Canberra) pada tahun 1971, Kantor Perwakilan RI sempat berpindah-pindah tempat.

Hubungan diplomatik Indonesia dan Australia selalu mengalami dinamikanya tersendiri. Hal tersebut ditandai dengan berbagai peristiwa seperti Konfrontasi Malaysia tahun 1963, integrasi Irian Jaya pada 1963 dan Timor Timur pada 1975, kasus David Jenkins, penunjukan Dubes Mantiri, dan peristiwa setelah jajak pendapat Timor Timur pada 1999. Namun, selalu saja ada upaya- upaya yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam menangani permasalahan- permasalahan yang terjadi tersebut. Mengingat Indonesia dan Australia jika dilihat dari skala geografis memiliki posisi yang dekat, keduanya memang harus memiliki hubungan bilateral yang erat.

Sejak tahun 1989, Lembaga Australia-Indonesia mulai didirikan. Tujuannya ialah untuk mempererat hubungan kerjasama kedua negara di bidang ekonomi, memperkenalkan budaya kedua negara, dan mengstabilkan kondisi kedua negara. Pada saat itu juga, APEC sebagai ruang bagi negara-negara di kawasan Asia Pasifik untuk mendorong kerjasama ekonomi, perdagangan, dan investasi pertama kali disarankan oleh Australia dan didukung penuh oleh Indonesia. Setelah itu, mulailah berkembang hubungan kerjasama Indonesia dan Australia. Tidak hanya barang yang menjadi fokus utama, namun juga jasa. Hal tersebut terus berkembang hingga sekarang.

Hubungan Indonesia dan Australia kembali diuji pada kasus Timor Timur. Tahun 1979, Australia mengakui kedaulatan Indonesia atas Timor Timur secara *de jure* meskipun sebelumnya terjadi perdebatan di Australia terkait status Timor Timur. Tahun 1999, Timor Timur memilih lepas dari Indonesia dan Australia dimandatkan oleh PBB untuk memimpin angkatan internasional atas keterlibatannya dalam memelihara keamanan di kawasan tersebut. Meskipun sempat terjadi ketegangan diantara Indonesia dan Australia, kedua negara tersebut telah bersepakat untuk menjalin hubungan yang menguntungkan.

Pada awal tahun 2000, PM Howard mengutus Menteri Luar Negeri Downer ke Indonesia. Setelah ini, hubungan kedua negara ini kembali harmonis. Hal ini ditandai dengan:

1. Penyelenggaraan *Australia-Indonesia Ministerial Forum (AIMF)* ke-5 di Canberra pada 7-8 Desember 2000 dan *Indonesia-Australia Ministerial Forum (IAMF)* ke-6 di Jakarta pada 11 Maret 2003 yang menghasilkan Joint Statement yang memuat tentang komitmen kedua negara untuk saling meningkatkan kerjasama pada berbagai bidang.
2. Kunjungan Presiden RI Abdurrahman Wahid ke Canberra pada tanggal 24-29 Juni 2001 setelah sempat tertunda beberapa kali.
3. Kunjungan PM Howard sebanyak 3 kali ke Jakarta yang mana pada pertemuan pertama menghasilkan Komunike Bersama berisi 15 kesepakatan kedua pemimpin negara untuk memperkuat hubungan di masa depan, pertemuan kedua menghasilkan penandatanganan *MoU on Combating International Terrorism*, dan pertemuan terakhir menghasilkan komitmen dalam pemberian bantuan terhadap kasus Bom Bali oleh Australia.
4. Pertemuan informal antar pejabat tinggi Dephan kedua negara di Bali pada 12 September 2001 yang menjadi dialog awal antar kedua Dephan yang mencairkan hubungan kedua instansi pertahanan setelah beku akibat krisis Timor Timur September

1999 yang berlanjut dengan adanya saling kunjung beberapa pejabat tinggi Dephan dan militer kedua negara.

5. Penyelenggaraan *Regional Ministerial Conference on People Smuggling Trafficking in Persons and Related Transnational Crimes* di Denpasar pada 16-28 Februari 2001 dan pada 29-30 April 2003, serta *Conference on Combating Money Laundering and Suppresin on Financing Terrorism* di Denpasar pada 17-18 September 2002.
6. Kunjungan Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubowono X ke Canberra, Melbourne, dan Hobart tanggal 17-21 Juni 2002 untuk meningkatkan hubungan bilateral melalui jalur budaya dan pariwisata kedua negara.

Di tengah-tengah berbagai upaya yang dilakukan tersebut, hubungan Australia dan Indonesia kembali mengalami tekanan akibat serangan teroris 11 September 2001 dan Tragedi Bali 12 Oktober 2002 yang memakan banyak korban Australia. Akibat kejadian tersebut, Pemerintah Australia mengeluarkan beberapa kebijakan dalam memandang kasus terorisme dan kebijakan tersebut malah menimbulkan gesekan terhadap hubungan Australia dan Indonesia. Akan tetapi, hal tersebut justru semakin mempererat hubungan keduanya. Indonesia dan Australia bersama-sama membentuk sebuah tim gabungan dalam mengungkap pelaku Bom Bali dengan Joint Investigation Team antar kedua kepolisian dan Badan Intelijen Negara.

Selain di bidang politik, hubungan bilateral Australia dan Indonesia juga erat dalam bidang ekonomi. Terdapat beberapa persetujuan yang mendasari hubungan perdagangan Indonesia-Australia:

1. Pada 14 November 1972 ditandatanganinya Trade Agreement di Canberra
2. Pada 17 November 1992 ditandatanganinya Agreement Concerning the Promotion and Protection of Investment di Jakarta
3. Pada 22 April 1992 ditandatangainya Agreement for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion di Jakarta
4. Pada 24 Februari 1999 ditandatangainya Umbrella MoU concerning Food Inspection and Certification Systems di Bali

Australia merupakan mitra dagang utama Indonesia untuk kawasan Asia Pasifik dan termasuk 15 kelompok negara mitra dagang utama Indonesia. Pada tahun 1998, ekspor Indonesia ke Australia menempati peringkat ke-8 negara- negara pemasok barang ke Australia dan menurun pada tahun selanjutnya yang menempati urutan ke-12.

Berdasarkan data Biro Statistik Australia (dalam Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, 2004, hal. 45) total perdagangan bilateral Indonesia Australia tahun 2002 mencapai AS\$ 4,02 miliar yang meningkat sebesar AS\$ 451 juta atau naik 12,59% jika dibandingkan dengan periode sebelumnya. Ekspor donesia ke Australia pada tahun 2002 sebesar AS\$ 2,36 miliar atau naik 22,77% dibandingkan dengan periode sebelumnya yang mana terjadi peningkatan yang cukup signifikan untuk ekspor migas dan non-migas. Di sisi lain, impor Indonesia dari Australia pada tahun 2002 mengalami sedikit peningkatan yang mana nilai impor tersebut tercatat sebanyak AS\$ 1,66 miliar atau naik 0,69% dibandingkan tahun sebelumnya.

Selama tahun itu pula, diketahui terdapat 30 produk yang mengalami peningkatan ekspor dan 11 produk lainnya mengalami penurunan. Produk yang mengalami peningkatan ekspor tersebut adalah produk kayu dan gabus, kertas, kertas karton dan olahannya, barang tenun, kain tekstil dan hasil-hasilnya, serta sepatu dan peralatan kaki. Komoditi yang memiliki nilai ekspor terbesar adalah emas non-moneter. Adapun produk ekspor yang mengalami penurunan diantaranya adalah produk mesin listrik, spare parts dan alat-alatnya, karet mentah, sintesis, mesin kantor dan pengolah data otomatis, plastik primer, barang- barang logam, dan yang memiliki penurunan terbesar ialah minyak dan lemak nabati.

Barang-barang yang mengalami peningkatan ekspor tersebut menunjukkan bahwa Indonesia memang kaya akan sumber daya alam. Hal tersebut ditandai dengan banyaknya hasil-hasil alam yang mendominasi peningkatan ekspor tersebut seperti kayu dan kertas yang berasal dari pohon. Hasil-hasil sumber daya alam tersebut kemudian diekspor kepada negara-

negara maju yang memiliki kemampuan teknologi dan sumber daya manusia yang mumpuni untuk mengolahnya

Di bidang investasi, Australia merupakan investor asing yang memiliki potensi yang tinggi bagi Indonesia dan menduduki peringkat ke-9 dengan total investasi sebesar AS\$ 9,4 miliar. Sebagian besar investasi Australia bergerak di sektor pertambangan dengan total nilai investasi AS\$ 3,2 miliar. Investasi modal Australia tidak hanya tersalur pada investasi langsung, melainkan melalui investasi portofolio dan akuisisi perusahaan (Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, 2004, hal. 46-47).

Pada tanggal 14 Juni 1968, telah ditandatangani persetujuan kebudayaan antara Australia dan Indonesia kemudian pada April 1992, kedua negara tersebut menandatangani persetujuan kerjasama di bidang perikanan sebagai salah satu upaya dalam mengatasi masalah pelanggaran yang dilakukan oleh nelayan yang memasuki wilayah perairan Australia secara ilegal. Kemudian pada tanggal 27 April 1989, telah didirikan Australia-Indonesia Institute (All) oleh Australia dan dibentuk pula Perhimpunan-Australia (PIA).

Australia-Indonesia Institute (All) merupakan suatu lembaga yang meawadahi kerjasama antara Indonesia dan Australia dengan menawarkan beberapa aktivitas kerjasama yang terbagi ke dalam beberapa kategori, seperti di bidang media, kepemudaan, seni, sains dan teknologi, bisnis dan perdagangan, bahasa dan kebudayaan Australia di Indonesia, serta bahasa dan kebudayaan Australia di Indonesia. Dengan tujuan untuk memperkuat pengetahuan masyarakat terkait kedua negara tersebut dan mempromosikan aktivitas kedua negara, All diharapkan mampu menjadi jembatan bagi keberlangsungan hubungan dan kerjasama yang baik antara Indonesia dan Australia.

Sejak tahun 1974, Indonesia menawarkan program Dharmasiswa yang memberikan beasiswa kepada pemuda Australia yang ingin belajar ke Indonesia. Adanya program *Australia Consortium for In Country Indonesia Studies (ACICIS)* dan *University Mobility in Asia Pacific (UMAP)* semakin menambah jumlah pemuda Australia yang belajar ke Indonesia. Adapun pertukaran pemuda melalui *Australia-Youth Exchange Program (AIYEP)* dimulai sejak 1981 dan program ini juga ikut mendorong berkembangnya saling pengertian antar kedua negara.

Selain di bidang pendidikan, kerjasama bidang sosial budaya antara Australia dan Indonesia juga ditandai dengan kerjasama state-province antara kota-kota di Indonesia dan Australia, seperti hubungan kerjasama antara Fremantle dengan Surabaya yang merupakan bagian kerjasama antara negara bagian Australia Barat dan Pemda Jawa Timur yang ditandatangani pada tanggal 21 Agustus 1996 di Perth. Tidak hanya Fremantle dan Surabaya, namun Queensland dengan Jawa Tengah, Northern Territory dengan provinsi-provinsi di Kawasan Timur Indonesia, dan New South Wales dengan Jakarta juga melakukan hal yang sama. Terdapat juga kerjasama kota kembar (*sister city*) antara Ujung Pandang dengan Lismore, Jakarta dengan Sydney, Ambon dengan Darwin, Semarang dengan Brisbane, dan Kuoang dengan Palmerstone.

Dalam hubungan kerjasama pertahanan dan keamanan antara Indonesia dan Australia sempat membeku setelah dibatalkannya Perjanjian Pemeliharaan Keamanan (*Agreement on Maintaining Security-AMS* 1995) pada tanggal 16 September 1999 sebagai pernyataan ketidaksenangan Indonesia atas Australia dalam masalah Timtim dan dihentikan latihan bersama serta ditinjau seluruh kerjasama militer Indonesia-Australia. Akibat dari kejadian ini, Australia justru malah kehilangan sumber informasi mengenai keberadaan keadaan keamanan di perairan Australia, juga berdampak pada kepentingan Australia dalam usahanya menangkal imigran gelap dan narkoba, termasuk melakukan latihan-latihan di perairan Indonesia.

Kerjasama militer dengan TNI Angkatan Laut sangat dikehendaki oleh Australia demi membendung arus imigran gelap dari Timur Tengah dan Asia Selatan yang akhir-akhir ini banyak membanjir ke Australia dengan menjadikan Indonesia sebagai *transit point*. Selain itu, ketika masih terjalinnya hubungan kerjasama pertahanan dengan Indonesia, terdapat

pertukaran informasi dan patroli bersama di perairan perbatasan sehingga dengan mudah mendeteksi kapal-kapal asing yang memasuki wilayah perairan kedua negara. Oleh karena itu, di tahun 2000, beberapa delegasi tingkat tinggi militer Australia berkunjung ke Jakarta dengan harapan sesegera mungkin dapat memulihkan hubungan kerjasama militer.

Dengan melihat besarnya peluang kerjasama Indonesia-Australia dalam berbagai bidang, maka pada 22 Maret 2016, diresmikan Kantor Konsulat Jenderal Australia di Makassar, kota ketiga di Indonesia setelah Bali dengan tujuan untuk mempermudah masyarakat timur Indonesia mengakses info terkait Australia, meningkatkan kerjasama ekonomi antara kawasan timur Indonesia dengan Australia, dan mempererat hubungan antara kedua negara pada umumnya. Di masa depan, banyak kepentingan bersama dengan Australia karena justru di sana pola dan sifat produksi adalah sama dan atau komplementer dengan bagian timur Indonesia (Hadi Soesastro, 2005, hal. 378).

Makassar menjadi pilihan karena Makassar merupakan kota termaju di kawasan timur Indonesia dengan letak geografis yang dekat dengan Australia, dan diharapkan dapat memperluas peluang kerjasama ekonomi dengan Indonesia bagian timur, khususnya, dan Indonesia pada umumnya.

Penelitian ini berfokus pada kerja sama Australia dan Kawasan Timur Indonesia baik itu berupa kerja sama di bidang kebudayaan, pendidikan, ekonomi, atau sosial/pengembangan masyarakat setelah dibukanya Konsulat Jenderal Australia di Makassar sejak tahun 2016 hingga 2017.

2. KERANGKA ANALISIS

Esensi dari suatu hubungan yang harmonis adalah interaksi yang baik antar kedua belah pihak. Tidak dapat dipungkiri bahwa suatu negara tidak akan bisa hidup sendiri. Dalam memenuhi kepentingannya, negara harus berinteraksi dengan negara lain. Interaksi dengan negara lain dapat diimplementasikan dengan hubungan kerjasama yang akan saling menguntungkan kedua belah pihak, baik itu secara bilateral maupun multilateral. Selain itu, kerjasama dinilai dapat meredakan konflik yang terjadi antarnegara. Pemecahan terhadap masalah ini, menurut Adam Smith dan Tom Paine, adalah dengan membebaskan pergerakan barang niaga (komoditi), modal, dan tenaga kerja (Scott Burchill, 2015, hal. 47). Kerjasama bilateral diyakini sebagai bentuk kerjasama yang terjadi antara dua negara. Kerjasama tersebut mencakup banyak hal, seperti dalam bidang politik, ekonomi, sosial, maupun budaya. Dalam hal pelaksanaannya, kerjasama bilateral bertujuan untuk memenuhi kepentingan nasional dari suatu negara, di samping untuk meningkatkan mutu kualitas hubungan antarnegara yang bersangkutan.

Dalam melakukan kerjasama, sekurang-kurangnya harus dimiliki dua syarat utama, yaitu pertama, adanya keharusan untuk menghargai kepentingan nasional masing-masing anggota yang terlibat. Tanpa adanya penghargaan tidak mungkin dapat dicapai suatu kerjasama yang diharapkan seperti semula. Kedua, adanya keputusan bersama dalam mengatasi setiap persoalan yang timbul. Untuk mencapai keputusan bersama, diperlukan komunikasi dan konsultasi secara berkesinambungan. Frekuensi komunikasi dan konsultasi harus lebih tinggi daripada komitmen (Sjamsumar Dam, 1995, hal. 15).

Menilik hubungan Indonesia dan Australia yang penuh dengan berbagai dinamika, kerjasama yang baik antar kedua negara ini sangat diperlukan. Pembentukan lembaga Australia-Indonesia Institute merupakan salah satu langkah awal yang dilakukan oleh kedua negara bersangkutan dalam upaya peningkatan mutu kualitas hubungan antarnegara. Dari sinilah kerjasama bilateral kedua negara dimulai. Kerangka kerjasama ini mengandung argumen-argumen dan kesepakatan-kesepakatan baru tentang bagaimana hubungan bilateral kedua negara seharusnya dikelola agar efektif dan produktif, termasuk mengkonsentrasikan kerjasama pada bidang-bidang di mana kedua negara mempunyai kesetaraan kepentingan. Hal ini diyakini mampu menjadi faktor yang memberi motivasi terhadap stabilitas hubungan di masa depan (Dugis, 2015, hal. 316). Oleh karena itu, kedua negara saling berharap ketika lembaga ini telah terbentuk, kerjasama bilateral Australia - Indonesia akan semakin erat

walaupun ke depannya masih banyak tantangan yang harus dihadapi.

Dalam hal melakukan kerjasama bilateral dengan negara lain, diperlukan pihak-pihak yang dapat menyokong dan mendukung jalannya kerjasama tersebut. Pihak-pihak tersebut adalah perwakilan dari masing-masing negara yang ditempatkan di negara penerima, dengan maksud agar mempermudah komunikasi yang terjalin antara kedua negara yang bersangkutan. Pihak-pihak yang dimaksud adalah perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler. Keduanya memiliki tugas dan fungsi yang berbeda.

Dalam hal kerjasama Indonesia-Australia untuk meningkatkan perekonomian di Indonesia bagian timur, maka yang memiliki tanggung jawab dalam mendorong pelaksanaannya ialah konsulat jenderal dan konsul yang merupakan pejabat konsuler yang telah ditempatkan di Kota Makassar. Kegiatan perwakilan konsuler meliputi seluruh kepentingan negara pengirim dan mempunyai wilayah kerja tertentu dalam wilayah negara penerima (Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1976 tentang Pokok-Pokok Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, 1976).

Selain memiliki fungsi proteksi dari negara pengirim terhadap negara penerima, konsulat jenderal juga memiliki banyak tugas dan fungsi lainnya. Salah satunya adalah melanjutkan pembangunan hubungan komersial, ekonomi, budaya, dan ilmu pengetahuan antara negara pengirim dan negara penerima dalam hal mempromosikan hubungan keakraban antara kedua negara tersebut (*Vienna Convention on Consular Relations and Optional Protocols*, 1963). Oleh karena itu, dengan diresmikannya Konsulat Jenderal Australia di Makassar baru-baru ini, diharapkan mampu menjadi jalan pembuka bagi kawasan timur Indonesia untuk membina hubungan keakraban dengan Australia, salah satunya melalui bentuk kerjasama ekonomi yang selanjutnya akan dibahas dalam penelitian ini.

Negera-negara berkembang terkadang dihadapkan oleh berbagai masalah seperti kemiskinan, bencana alam, lingkungan, kesehatan, dan teknologi. Berkelanjutannya masalah-masalah yang dialami oleh negara-negara tersebut memicu hasrat negara-negara maju untuk menyodorkan sejumlah bantuan baik itu berupa pemberian dana hibah, pengiriman barang, penyediaan sumber daya manusia, dan masih banyak lagi. Hal ini didasari oleh rasa saling tolong-menolong antarnegara agar dapat tercipta perdamaian dunia, terlepas dari motif kepentingan negara pendonor.

Menurut Holsti (1995, hal. 180), bantuan luar negeri merupakan transfer uang, teknologi, atau pun nasihat-nasihat teknis dari negara donor ke negara penerima. Sedangkan menurut Peter Hess (1997, hal. 498) bantuan luar negeri termasuk ke dalam pemberian sumber daya secara unilateral dari negara pemberi ke negara penerima dengan tujuan untuk mempromosikan pembangunan ekonomi. Bantuan luar negeri dapat terbagi ke dalam beberapa bentuk, yaitu pemberian uang secara langsung, transfer komoditas (bahan-bahan konstruksi, makanan, dan obat-obatan), asisten teknis konsultan, relawan, dan tenaga bantuan), dan bantuan pinjaman. Bantuan luar negeri dapat diberikan untuk proyek-proyek tertentu seperti pembangunan penjernihan air atau untuk mendukung jalannya sebuah program seperti perbaikan hal-hal yang lebih makroekonomis. Bantuan luar negeri dapat diberikan secara bilateral (pemerintah ke pemerintah) atau multilateral (negara pendonor memberikan bantuan kepada organisasi internasional seperti Bank Dunia atau PBB, kemudian mereka yang akan menyalurkan bantuan tersebut kepada negara-negara penerima).

Bisa dikatakan bahwa Kawasan Timur Indonesia masih memerlukan pengembangan baik di bidang infrastruktur maupun sumber daya manusia. Beberapa bantuan luar negeri melalui pemberian dana maupun program telah dilakukan oleh sejumlah negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Kanada. Ke depan, Australia juga akan melancarkan program-program bantuannya dalam pengembangan Kawasan Timur Indonesia melalui Konsulat Jenderal Australia yang telah dibuka di Makassar.

3. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian kualitatif deskriptif. Metode penelitian ini akan menjelaskan bagaimana prospek pembukaan Konsulat Jenderal Australia di Makassar dalam rangka kerjasama ekonomi dengan Indonesia bagian timur. Selain itu, metode penelitian kualitatif akan membantu penulis untuk mengetahui kepentingan kedua negara. Dalam teknik pengumpulan data, penulis menggunakan metode *Library Research* dan wawancara untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan. Data data dapat didapatkan melalui buku, jurnal, dokumen, artikel, serta dari berbagai media lainnya seperti internet, majalah ataupun surat kabar harian. Adapun wawancara akan dilakukan di Konsulat Jenderal Australia di Makassar.

Jenis data yang penulis gunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui hasil wawancara dengan pihak Konsulat Jenderal Australia di Makassar. Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi literatur seperti buku, jurnal, artikel, majalah, handbook, situs internet, institut dan lembaga terkait. Adapun data yang dibutuhkan ialah data yang berkaitan langsung dengan penelitian penulis tentang prospek pembukaan Konsulat Jenderal Australia di Makassar dalam rangka kerjasama ekonomi dengan kawasan timur Indonesia. Adapun teknik analisis data yang digunakan oleh penulis dalam menganalisis data hasil penelitian adalah teknik analisis kualitatif. Mula-mula data direduksi dengan menggolongkan mana yang perlu diambil dan dibuang, kemudian disajikan dengan naratif terhadap hasil penelitian/pengumpulan informasi, setelah itu menarik kesimpulan terhadap hasil analisis data.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Hubungan Bilateral Indonesia - Australia

Setiap kerjasama yang terjalin antara kedua negara tentu mengalami dinamika dalam pelaksanaannya, entah itu berupa masalah-masalah kecil atau besar. Namun, selalu ada solusi dalam menanggapi permasalahan-permasalahan tersebut karena kedua negara saling sadar bahwa mereka tidak akan bisa hidup sendiri tanpa bantuan dari negara lain. Kebutuhan-kebutuhan yang mereka inginkan dari negara lain tersebut kemudian diterjemahkan sebagai kepentingan nasional yang harus terpenuhi demi kelancaran program kerja suatu negara atau kesejahteraan masyarakatnya. Hubungan Indonesia dan Australia telah beberapa kali diwarnai oleh beberapa konflik dan perbedaan pandangan maupun pendapat. Akibatnya, gesekan-gesekan pun terjadi di antara kedua negara dan menyebabkan timbulnya berbagai masalah. Hal-hal yang menjadi faktor bergejolaknya hubungan kedua negara tersebut yaitu pelaksanaan demokrasi dan budaya politik, kebijakan politik luar negeri, adanya kekhawatiran dan persepsi ancaman keamanan, dan kurang kokohnya hubungan ekonomi kedua negara.

Di masa-masa kemerdekaan Indonesia, Australia merupakan salah satu negara yang turut serta dalam perjuangan rakyat Indonesia dalam mencapai pengakuan kedaulatannya. Selain menggalang dana untuk membantu perjuangan rakyat Indonesia, para buruh juga melakukan aksi boikot terhadap 559 kapal- kapal dagang dan perang Belanda yang sedang bersiap membawa kembali pemerintah kolonial Belanda ke Indonesia. Selain itu, Australia secara *de facto* mengakui kedaulatan Indonesia pada bulan Juli 1947 dan secara *de jure* pada bulan Desember 1949. Australia juga menjadi co-sponsor Indonesia ketika akan menjadi anggota PBB pada tahun 1950.

Hubungan baik kedua negara ini tidak berlangsung lama. Pada tahun 1950- an hingga tahun 1960-an, jalinan hubungan kedua negara memburuk. Pada tahun 1950-an, Australia menampakkannya dirinya sebagai penentang Indonesia karena kebijakan di Indonesia yang di bawah kepemimpinan Soekarno berusaha merrebut kembali Irian Barat (1957-1963) dan konfrontasi dengan Malaysia (1963-1966). Selain itu, Parati Buruh dengan Perdana Menteri Joseph Benedict Chifley kepada Partai Koalisi Liberal-Country, Robert Menzies ketika mengalami pergantian pemerintahan Australia juga cukup memengaruhi perubahan yang signifikan antara Indonesia dan Australia. Kondisi ini berlangsung hingga tahun 1960-an dan

disebabkan oleh perbedaan ideologi antara Partai Buruh dan Koalisi Liberal- Country yang selanjutnya mengubah pandangan Australia terhadap Indonesia. Pemerintah yang baru tersebut menentang kedaulatan Indonesia atas Irian Barat dan lebih senang dengan keberadaan Belanda di Irian Barat. Hal yang dilakukan oleh Australia tersebut didasari oleh dua hal: pertama karena Australia khawatir terhadap Indonesia yang baru merdeka akan menanggung beban yang berat dalam menangani Irian Barat yang masih primitif, kedua karena Australia khawatir munculnya bibit-bibit komunisme di Indonesia. Namun setelah kejatuhan Soekarno dan lahirnya era Soeharto pada 1967, hubungan kedua negara ini mulai menghangat. Rupanya, pemerintahan Indonesia yang baru yang anti-komunis dan lebih mengutamakan kebijakan luar negeri bebas aktif ternyata mampu membuat hubungan antara Indonesia dan Australia kembali membaik. Hal ini ditandai dengan dibentuknya suatu konsorium lembaga keuangan internasional yaitu *Intern Governmental Group on Indonesia* (IGGI) pada tahun 1967 untuk membantu pembangunan di Indonesia, serta pada tahun 1968 dibentuk *Cultural Agreement* yang membantu program pertukaran bersama di bidang budaya dan pendidikan.

Pada tanggal 7 Desember 1975, hubungan kedua negara kembali retak ketika Indonesia melakukan intervensi militer ke Timor Timur. Apalagi ditambah dengan tewasnya lima wartawan Australia di medan pertempuran Balibo semakin mempekeruh hubungan kedua negara ini. Namun, setelah Partai Buruh berkuasa lagi pada tahun 1983 dengan kemenangan Bob Hawke atas Malcolm Fraser, hubungan Australia-Indonesia kembali membaik. Meningkatnya hubungan antar kedua negara ini ditandai dengan kunjungan sepuluh menteri Australia dari tahun 1983 sampai dengan tahun 1986. Puncaknya pada 22 Agustus 1985 ketika Bob Hawke menyatakan pengakuan terhadap pengintegrasian Timor Timur dalam Indonesia secara de jure. Akan tetapi, ketika David Jenkins menulis artikel yang menyoroti tentang bisnis keluarga Soeharto, hubungan antara Australia-Indonesia kembali retak. Akibatnya, pemerintah Indonesia membatalkan kunjungan B.J. Habibie ke Australia. Indonesia juga menolak visa kunjungan ke Bali oleh turis Australia satu pesawat dan memperpanjang larangan bagi wartawan Australia untuk meliput di Indonesia. Selama dua tahun hubungan kedua negara tidak membaik dan baru akan mencair pada tahun 1988. Menteri Pertahanan Australia, Kim Beazly, pada 23 Februari 1988 mendesak pemerintah Australia agar kembali memperbaiki hubungan kerjasama pertahanan keamanan dengan Indonesia.

Sejak saat itu hingga Juni 1995, hubungan Indonesia dan Australia mulai membaik. Hal ini disebabkan oleh tingkah kedua negara tersebut yang mampu memperkokoh landasan hubungan bilateral mereka melalui hubungan antara Gareth Evans dan Menteri Luar Negeri Ali Alatas, Presiden Soeharto dan Perdana Menteri Keating yang membuka jalur komunikasi *hotline* sejak tahun 1993, dan peningkatan hubungan kerjasama di berbagai bidang seperti ekonomi, politik, pertahanan keamanan, dan budaya.

Di bidang ekonomi, Indonesia dan Australia telah berhasil menandatangani Perjanjian Celah Timor pada tahun 1989 yang mengatur kerjasama eksplorasi minyak di Laut Timor. Pada tahun 1992, kedua negara ini juga berhasil membuat Forum Menteri Indonesia-Australia yang diharapkan dapat meningkatkan kerjasama di bidang pangan dan pertanian, perdagangan, industri, dan investasi. Selain itu, Australia juga rutin memberikan bantuan kepada Indonesia sebesar 100 juta dollar Australia untuk pembangunan Kawasan Timur Indonesia.

Sementara di bidang pertahanan dan keamanan, kedua negara berhasil menandatangani perjanjian akstradiksi dan pengaturan nelayan. Mereka juga melakukan berbagai bentuk kerjasama seperti kunjungan pejabat militer, transparansi dalam hal kekuatan pertahanan keamanan, program pendidikan dan latihan militer gabungan. Sejak tahun 1990, Indonesia dan Australia telah mengadakan latihan militer gabungan seperti *Knight Komodo* dan *Kookaburra* (Angkatan Darat), *Ausina Passexs* dan *Ausina Patroless* (AL), serta Rajawali Ausindo dan Elang Ausindo. Sejak tahun 1989, Indonesia beberapa kali menjadi pengamat latihan militer gabungan angkatan bersenjata Australia dengan sandi Kangaroo dan

Indonesia menjadi partisipan aktif dalam Kangaroo 95 pada tahun 1995

Adapun di bidang pendidikan, sosial budaya dan turisme, kedua negara berhasil membentuk *Australia-Indonesia Institute (All)* pada 1989 yang mewadahi beragam kerjasama Indonesia dan Australia serta mendirikan *Australian International Development Assistance Bureau (AIDAB)* yang kemudian berganti nama menjadi AUSAID untuk memberikan beasiswa kepada masyarakat Indonesia yang ingin melanjutkan studinya ke Australia.

Di tengah-tengah harmonisnya hubungan antara kedua negara, pada tahun 1995 terjadi lagi gelombang pasang yang menimpa Indonesia dan Australia. Beberapa peristiwa penting menjadi gangguan bagi keduanya, seperti penolakan Australia terhadap Letjen (purn) H.B.L. Mantiri sebagai calon duta besar yang diajukan Indonesia untuk Australia pada 6 Juli 1995, pemberian visa oleh Australia kepada 18 imigran asal Timor Timur yang melarikan diri pada tanggal 24 Mei 1995, dan insiden pembakaran Merah Putih oleh demonstran Timor Timur anti-integrasi di beberapa kota di Australia seperti Sydney, Brisbane, Melbourne, dan Adelaide.

Uraian di atas membuktikan hubungan Indonesia dan Australia yang diwarnai dengan gesekan-gesekan membuat kedua negara tersebut menguras otak dalam mencari solusi dari setiap permasalahan-permasalahan yang terjadi. Perbedaan pendapat dan pandanganlah yang memicu nyalanya api diantara kedua negara ini. Perbedaan-perbedaan tersebut kemudian diterjemahkan sebagai perbedaan dalam hal pelaksanaan demokrasi dan budaya politik, kebijakan politik luar negeri, dan persepsi ancaman.

Kerjasama Indonesia-Australia Hingga Tahun 2017

Pasang-surutnya hubungan Indonesia dan Australia bukannya semakin memperparah hubungan antara kedua negara tersebut, malah membuatnya semakin erat. Berbagai upaya dilakukan demi memperkuat tali persaudaraan antara kedua negara ini, salah satunya adalah sesering mungkin menjalin hubungan kerjasama di berbagai bidang baik itu di bidang politik, ekonomi, sosial, maupun budaya. Australia dan Indonesia dalam memajukan kerjasamanya telah menyepakati beberapa perjanjian yang mengawali baiknya hubungan kedua negara ini, yakni diantaranya *Joint Declaration on Comprehensive Partnership Between Australia and the Republic of Indonesia* pada tahun 2005, *Agreement Between the Republic of Indonesia and Australia on the Framework for Security Cooperation ("Lombok Treaty")* pada tahun 2006, *Indonesia-Australia Joint Statement on the strategic partnership, media release* pada tahun 2010, *Second Indonesia-Australia Foreign Affairs and Defence Ministers 2+2 Dialogue Joint Communiqué* pada tahun 2013, *Joint Understanding on a Code of Conduct in Implementation of the Lombok Treaty* pada tahun 2014, *Joint Statement by Prime Minister Turnbull and President Widodo - 2017 Leaders meeting* pada tahun 2017, dan *Joint Declaration on Maritime Cooperation* pada tahun 2017.

Di bidang ekonomi dan perdagangan, terdapat pula beberapa contoh kerjasama yang dilakukan oleh kedua negara seperti *Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) negotiations*, *ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement*, *Regional Comprehensive Economic Partnership*, dan *Trans-Pacific Partnership*. Upaya-upaya yang dilakukan Australia ini berhasil membawa hubungan antara Indonesia dan Australia semakin erat.

Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) negotiations merupakan kerangka pikir dari Indonesia dan Australia untuk memperkuat hubungan ekonomi dan dagang mereka dan membuka peluang pasar di antaranya mengenai bisnis, produksi bahan-bahan pokok, penyediaan pelayanan, dan penanaman modal. IA-CEPA dibangun pada perjanjian multilateral dan regional termasuk AANZFTA sekomprensif mungkin. Australia dan Kementerian Perdagangan Indonesia mengaktifkan kembali negosiasi ini pada bulan Maret 2016 setelah pertama kali diperkenalkan pada tahun 2010. Dalam kepentingan dan keuntungan yang akan diperoleh, IA-CEPA diharapkan mampu mengatasi hambatan pada perdagangan bilateral (termasuk hambatan tarif dan non-tarif), meningkatkan akses terhadap pelayanan masing-masing pasar dan mengatasi

hambatan investasi terhadap kedua negara, serta kerjasama ekonomi yang dibawah oleh IA-CEPA dapat membantu implementasi dari perjanjian-perjanjian, mendukung fasilitas dagang, dan memberikan jalan bagi liberalisasi di masa depan.

Dalam perkembangannya, IA-CEPA pertama kali dikenalkan pada November 2010 kemudian pada Maret 2011 *The Australia-Indonesia Business Council* (AIBC) menggelar sebuah konferensi di Sydney dengan IA-CEPA sebagai topik utamanya. Di bulan selanjutnya, Dr. Emerson, Mantan Perdana Menteri Perdagangan Indonesia, mengunjungi Indonesia untuk mempersiapkan sebuah negosiasi terkait IA-CEPA. Karena kerjasama agrikultur merupakan bagian yang paling penting dalam kerjasama bilateral Indonesia dan Australia, maka melalui IA-CEPA, Australia mendukung penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan profitabilitas produsen daging sapi di Indonesia. Dalam proyek ini, *Australian Centre for International Agricultural Research* (ACIAR) bekerja sama dengan para petani untuk meningkatkan sistem produksi sapi Brahman di desa-desa Indonesia, dengan potensi bahwa sapi-sapi tersebut dapat dijual kepada peternak-peternak sapi yang berfokus pada usaha penggemukan sapi potong. Kemudian selanjutnya di tahun 2011, Dr Emerson kembali bertemu dengan perwakilan Indonesia di Bali untuk mediskusikan perdagangan dan pembangunan IA-CEPA. Pada tahun selanjutnya, masing-masing representasi dari *Australian Chamber of Commerce and Industry* (ACCI), *Indonesian Chamber of Commerce* (KADIN), *Australia-Indonesia Business Council* (AIBC) dan *the Indonesia-Australia Business Council* (IABC) membangun sebuah *Business Partnership Group* (BPG). BPG tersebut akan memberikan pandangan kepada pemerintah Indonesia dan Australia mengenai pertimbangan-pertimbangan terhadap perdagangan utama, investasi, dan kerjasama ekonomi IA-CEPA. Selanjutnya negosiasi IA-CEPA pun mulai dilakukan, pertama di Jakarta pada 2013, kedua di Canberra pada tahun yang sama, ketiga di Yogyakarta pada tahun 2016, keempat di Sydney pada tahun yang sama, kelima di Bandung pada tahun yang sama, dan keenam di Canberra pada tahun 2017.

Terkait dengan *ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement*, Australia bertekad untuk menjalin kerjasama dengan badan regional negara tetangganya demi mempererat hubungan dengan kawasan Asia Tenggara. Dalam pelaksanaannya, AANZFTA mengurangi perluasan tarif dan mengeliminasi komitmen, memberikan peluang baru bagi Australia untuk memasuki pasokan internasional di wilayah Asia Tenggara, mempromosikan kepastian yang lebih besar untuk investor Australia, dan menyediakan *platform* untuk keterlibatan ekonomi yang sedang berlangsung dengan ASEAN melalui proyek-proyek kerjasama. Hal ini sedikit berbeda dengan *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) yang dibentuk pada tahun 2012. Walaupun sama-sama berfokus pada ASEAN, RECP diluncurkan oleh ASEAN yang menginisiasi anggota-anggota ASEAN dan beberapa negara yang telah memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan ASEAN untuk mencapai perjanjian kerjasama ekonomi moderen, komprehensif, berkualitas, dan sama-sama menguntungkan yang akan mencakup perdagangan pada barang, pelayanan perdagangan, investasi, kerjasama ekonomi dan teknis, kekayaan intelektual, persaingan, penyelesaian sengketa, dan masalah lain.

Adanya negosiasi dan perjanjian kerjasama ekonomi dan perdagangan tersebut menghasilkan keuntungan yang besar bagi kedua negara. Di tahun 2014- 2015, perdagangan Indonesia dengan Australia mencapai 14,8 miliar dolar Australia melalui IA-CEPA. Adanya kerjasama ini diharapkan mampu meningkatkan performa hubungan ekonomi dan perdagangan antara kedua negara.

Program Bantuan dan Kerjasama Australia untuk Indonesia

Dalam perkembangannya, Australia banyak memberikan sumbangsih bagi perkembangan negara Indonesia baik dari segi bantuan berupa uang maupun tenaga kerja. Selain itu, Australia juga aktif dalam menjalankan beberapa program sosial-ekonomi di Indonesia yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat Indonesia dan membenahi kualitas sumber daya manusia

yang ada di Indonesia.

Akhir-akhir ini, Indonesia telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang tetap dan berhasil mencapai *middle income status* serta perkembangan pembangunan yang besar. Namun, pertumbuhan ekonomi Indonesia sekarang melemah dan kesenjangan semakin meningkat. Sekitar 100 juta orang di Indonesia bertahan hidup dengan penghasilan di bawah Rp30.000,00 per hari. Pertumbuhan yang sangat lamban itu membuat Indonesia sulit untuk mencapai target pembangunannya, apalagi dengan pertumbuhan yang lambat tersebut membuat masyarakat dengan golongan ekonomi rendah semakin susah meninggalkan garis kemiskinan.

Oleh karena itu, Australia dalam kontribusinya terhadap Indonesia memberikan estimasi bantuan sebesar \$365.7 juta pada tahun 2016-2017 dari total ODA, termasuk estimasi sebesar \$296 juta dalam pendanaan bilateral yang dikelola oleh DFAT. Program kerjasama pembangunan Indonesia yang dilakukan oleh Australia tersusun secara terstruktur ke dalam tiga fokus, yaitu infrastruktur dan institusi ekonomi yang efektif, peningkatan sumber daya manusia untuk masyarakat yang lebih produktif, dan masyarakat yang inklusif melalui sistem pemerintahan yang efektif.

Pemerintah Australia mendukung Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhannya yang lebih inklusif dan membantu mencapai keuntungan bersama dalam perdagangan internasional maupun investasi. Australia menyediakan bantuan teknis kepada Indonesia yang mana di dalamnya termasuk kemitraan antarpemerintah, yang fokus kepada pembaruan prioritas ekonomi Indonesia di beberapa area, seperti supervisi dalam sektor finansial, pendanaan, perdagangan, kebijakan pajak dan administrasi, dan manajemen makroekonomi. Karena dua pertiga dari masyarakat miskin di Indonesia tinggal di pedesaan, maka program bantuan Australia fokus kepada pembangunan di bidang sektor agrikultur. Pemerintah Australia mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif melalui upaya-upaya untuk memengaruhi bagaimana masyarakat miskin tersebut dapat dengan mudah mengakses pasar agrikultur, memperbaharui keamanan pangan, meningkatkan produktivitas agrikultur, dan menyokong pendapatan para petani dan para pekerja dengan membantu mengatasi berbagai kendala yang sering dialami seperti akses pinjaman.

Adapun program kerja Australia untuk Indonesia terkait infrastruktur dan institusi ekonomi yang efektif antara lain Indonesia *Infrastructure Initiative (IndII)*; Program Air dan Sanitasi Hibah Tahap Kedua; Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) 2; *The Australia Indonesia Infrastructure Grant for Municipal Sanitation (sAIIIG)*; *Australia Indonesia Partnership for Economic Governance (AIPEG)*; *Australia-Indonesia Partnership for Rural Economic Development Program (AIP-Rural)*.

Kemitraan pendidikan Australia mengestimasi dana sebesar \$367 juta sejak 2011 hingga 2017 ini membantu memperbaiki sistem pelayanan pendidikan di Indonesia dengan meningkatkan partisipasi pihak-pihak sekolah, memperbaiki kualitas pendidikan pada sekolah negeri, swasta, maupun madrasah, dan meningkatkan tata kelola pada sektor pendidikan. Program kemitraan ini telah berhasil menyelesaikan 1.155 sekolah dan menyediakan sekitar 160.000 sekolah baru. Adapun program pendidikan Australia di Indonesia antara lain *Australia Awards in Indonesia; Innovation's for Indonesia School Children (INOVASI)*; *Australia-UNICEF Rural and Remote Education Initiative for Papuan Province*.

Selain itu, pemerintah Australia juga aktif bekerja bersama pemerintah Indonesia dalam mengurangi angka kemiskinan melalui peningkatan pemberian layanan, penelitian, dan penguatan sistem pemerintahan. Berikut beberapa program kerja Australia yang bekerja sama dengan Indonesia dengan fokus kepada pemberdayaan masyarakat: Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK) Maju Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan (MAMPU); *Australia-Indonesia Partnerships for Justice (AIJP)*; Program Peduli. Program yang mengestimasi dana sebesar \$30.9 juta sejak 2014 - 2018 ini dipimpin oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan

Kebudayaan dan telah membangun kemitraan dengan 81 organisasi masyarakat di Indonesia pada 84 daerah di 26 provinsi. Program-program tersebut di atas yang telah dijalankan Indonesia bersama dengan pemerintah Australia diharapkan mampu mencapai tujuannya masing-masing demi masyarakat Indonesia yang lebih sejahtera dan harmonis serta sistem pemerintahan yang lebih terbuka, efektif, dan efisien. Dengan demikian, akan tercapai pula hubungan yang lebih erat antara pemerintah Australia dan Indonesia sehingga kedua negara tersebut saling memiliki kepercayaan untuk terus melakukan kerjasama melalui beragam program yang terus berinovasi.

Kehadiran Konsulat Jenderal Australia di Makassar

Sulawesi Selatan sebagai provinsi yang memiliki letak yang sangat strategis menjadikan Makassar, ibukota provinsi, sebagai kota yang maju dan pintu gerbang Kawasan Timur Indonesia. Hal ini disebabkan oleh Pelabuhan Makassar yang merupakan salah satu pelabuhan pintu gerbang di Indonesia telah menjadi pusat kolektor dan distributor barang ke Kawasan Timur Indonesia, khususnya untuk Provinsi Sulawesi Selatan. Karena letaknya yang strategis dan didukung oleh daerah hinterland Sulawesi Selatan yang potensial, Pelabuhan Makassar juga merupakan pusat pelayanan intersulair Kawasan Indonesia bagian timur (Sy. Firmansyah, 2016, hal. 10). Dengan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 7.6 persen, dibandingkan dengan 5 persen untuk wilayah lain di Indonesia, Makassar menjadi kota yang paling diincar untuk investasi, khususnya dalam sektor-sektor yang terus berkembang seperti pertanian, manufaktur dan pelayanan hospitality (Grigson, 2015). Sebagai pusat pelayanan di KTI, Kota Makassar berperan sebagai pusat perdagangan dan jasa, pusat kegiatan industri, pusat kegiatan pemerintahan, simpul jasa angkutan barang dan penumpang baik darat, laut maupun udara dan pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan, 2017). Berbagai potensi yang dimiliki Makassar tersebut menjadikan kota Makassar sebagai satu-satunya kota yang paling maju dan menjadi pusat perhatian berbagai negara di Indonesia bagian timur. Apalagi sekarang, pengembangan infrastruktur, penanaman modal asing, perbaikan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan perdagangan terus diupayakan oleh pemerintah Kota Makassar dan Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini tentu menarik perhatian negara-negara luar untuk melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kota Makassar atau Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang pada akhirnya juga akan membuka kesempatan untuk menjalin hubungan kerjasama dengan berbagai provinsi di kawasan timur Indonesia lainnya.

Berbagai negara yang memegang peran utama dalam peningkatan perdagangan ekspor-impor Sulawesi Selatan adalah Amerika Serikat, Singapura, Malaysia, Jepang, dan Argentina. Selama Januari - Maret 2017, total nilai ekspor Sulawesi Selatan mencapai US\$ 265,5 Juta jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2016, dimana nilai ekspor Sulawesi Selatan US\$ 223,37 Juta, maka telah terjadi peningkatan sebesar 18,86 persen dengan Jepang sebagai negara tujuan ekspor dengan nilai terbesar pada Maret 2017 dengan nilai US\$ 50,49 juta atau 58,03 persen dari total nilai ekspor Sulawesi Selatan. Selain itu, selama Januari - Maret 2017 nilai impor Sulawesi Selatan mencapai US\$ 254,47 Juta, naik sebesar 75,01 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2016 dengan Tiongkok sebagai negara asal impor dengan nilai terbesar pada bulan Maret 2017 dengan nilai US\$ 25,67 juta atau 32,97 persen dari total nilai impor Sulawesi Selatan (BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 2017).

Peningkatan nilai perdagangan ekspor-impor yang dialami oleh Sulawesi Selatan dengan bermitra bersama negara-negara besar telah memperlihatkan kemajuan yang pesat bagi salah satu provinsi di Indonesia bagian timur ini. Wajar saja jika Provinsi Sulawesi Selatan yang beribukota di Makassar menjadi percontohan bagi provinsi-provinsi lain di Kawasan Timur Indonesia agar juga dapat mengembangkan potensi yang berada di wilayahnya masing-masing sehingga akan tercapai masyarakat yang maju, perekonomian yang stabil, dan infrastruktur yang memadai.

Konsulat Jenderal Australia sebagai Langkah Awal Pemerintah Australia untuk Mempererat Hubungan Kerja Sama dengan Kawasan Timur Indonesia

Dengan mengacu kepada data-data di atas dan setelah melalui proses yang cukup panjang, akhirnya pada tanggal 22 Maret 2016, diresmikan Konsulat Jenderal Australia yang kedua di Indonesia setelah Bali, yaitu di Makassar. Selain untuk mempererat hubungan kerjasama Australia dan Indonesia agar tidak hanya terpusat di ibukota, melainkan juga dapat menyentuh kawasan Indonesia yang lain, keberadaan Konsulat Jenderal Australia di Makassar ini juga melayani pembuatan visa agar orang-orang di Indonesia bagian timur tidak perlu repot-repot ke ibukota mengurus visa untuk berkunjung ke Australia. Kini, masyarakat di Kawasan Timur Indonesia bisa lebih mudah mengakses informasi seputar negara kanguru tersebut, baik untuk berlibur, melanjutkan pendidikan, maupun berinvestasi bisnis.

Berbagai upaya terus ditingkatkan oleh Pemerintah Australia dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kawasan Timur Indonesia setelah dibukanya Konsulat Jenderal Australia di Makassar. Seperti contoh, di bidang pendidikan, Pemerintah Australia bekerja sama dengan Bappenas dalam rangka memberikan bantuan kepada anak-anak. Pemerintah Australia juga aktif memberikan beasiswa Australian Awards kepada para pelajar Indonesia yang ingin melanjutkan studinya di Australia. Dalam hal mengembangkan kemampuan pelajar dari Indonesia Timur, Pemerintah Australia memberikan semacam pelatihan berupa *English Language Training Assistance* selama tiga bulan kepada para pelamar beasiswa Australian Awards yang berasal dari Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Papua Barat. Hal ini disebabkan oleh kemampuan bahasa Inggris yang dimiliki oleh para pelamar dari provinsi-provinsi tersebut masih kurang sehingga Pemerintah Australia merasa perlu untuk memberikan bantuan berupa pengajaran agar dapat bersaing dengan pelamar lainnya yang berasal dari daerah Jawa, Sumatera, Kalimantan, Bali, dan Sulawesi.

Adapun dengan sekolah-sekolah yang berada di Kawasan Timur Indonesia, Pemerintah Australia memiliki suatu program yang bernama Bridge Schools. Program ini merupakan program sister-school yang mana guru-guru baik dari sekolah swasta, negeri, maupun madrasah akan dikirim ke salah satu sekolah di Australia untuk mengajar seputar bahasa dan kebudayaan Indonesia. Di Sulawesi Selatan sendiri, terdapat sekitar dua belas sekolah yang sudah menjalin hubungan sister-school dengan sekolah-sekolah yang berada di Australia, salahsatu sekolah di Sulawesi Selatan yang dimaksud ialah SMA Katolik Rajawali.

Selain di bidang pendidikan, Pemerintah Australia juga aktif dalam pengembangan sektor turis di Kawasan Timur Indonesia. Pemerintah Australia melihat bahwa Kawasan Timur Indonesia memiliki potensi pariwisata yang sangat besar untuk dikembangkan. Oleh karena itu, melalui program *Short-Course* selama dua minggu yang akan diadakan pada bulan September nanti, beberapa pegawai Dinas Pariwisata ataupun yang bekerja di industri pariwisata akan dikirim ke Australia untuk diberikan pelatihan profesi seputar pengembangan turisme yang berkelanjutan. Program yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan peserta untuk merencanakan pembangunan objek-objek wisata dan meingkatkan industri pariwisata ini diharapkan bagi para pesertanya agar mampu mengembangkan potensi pariwisata di daerahnya masing-masing sesuai program.

Sejumlah provinsi di Kawasan Timur Indonesia yang dinilai masih sangat terbelakang terus diupayakan agar masyarakat dan infrastrukturnya semakin maju. Beberapa proyek sosial telah dijalankan di sana melalui program bantuan baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Pemerintah Australia dalam komitmennya menjalankan hubungan bilateral dengan Pemerintah Indonesia terus berusaha untuk mengembangkan beberapa sektor di wilayah Indonesia agar dapat menyeimbangi sektor-sektor lain yang dinilai telah maju. Oleh karena itu, dengan dibukanya Konsulat Jenderal Australia di Makassar, perwakilan konsuler tersebut diharapkan dapat menjadi jembatan yang efektif antara masyarakat timur Indonesia yang memiliki minat untuk mempelajari Australia lebih dalam, para investor dan pengusaha yang akan menjalin hubungan bisnis, serta pemerintah daerah yang ingin mengembangkan

wilayahnya dengan Pemerintah Australia yang terus aktif dalam menjalankan program-program pemberdayaan ekonomi dan masyarakat di Kawasan Timur Indonesia.

Sejak dibukanya Konsulat Jenderal Australia di Makassar, Pemerintah Australia menilai bahwa hubungan kerjasama antara Pemerintah Australia dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Kota Makassar, dan pemerintah di provinsi-provinsi lain semakin meningkat, terutama dengan beberapa kabupaten dan Bappenas tiap kota. Hal ini disebabkan karena Pemerintah Australia semakin gencar dalam memberikan bantuan kepada provinsi dan kota-kota terkait serta mengunjungi daerah-daerah pelosok. Bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Australia macam-macam, ada yang berupa program ataupun *fresh money*, bergantung kepada kebutuhan masing-masing kota dan provinsi.

Hingga sekarang, pemerintah Australia masih terus berupaya untuk membangun hubungan yang baik antara Australia dan Kawasan Timur Indonesia. Pendekatan-pendekatan yang dilakukan berupa kerjasama dalam bentuk program, kunjungan kenegaraan, dan promosi. Sebagai contoh, setelah diresmikannya Konsulat Jenderal Australia di Makassar, Pemerintah Australia aktif berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar seperti Eight Festival yang diadakan pada akhir tahun 2016 kemarin di Pantai Losari. Saat itu, Konsulat Jenderal Australia ikut berperan serta pada kategori 'Food' and 'Fine Arts'. Konsulat Jenderal Australia menyediakan sate sapi Australia dan memperkenalkan budaya penduduk asli Australia lewat pameran foto suku Aborigin Australia. Di bulan Juli 2016, Konsulat Jenderal Australia menggelar kunjungan sekolah, kunjungan museum, workshop pendongeng dan sesi dongeng Aborigin yang merupakan rangkaian acara perayaan Pekan Budaya Penduduk Asli Australia 2016. Selain itu, pada bulan Januari tahun 2017 juga diadakan Festival Sinema Australia Indonesia di Trans Studio Mall. Di bulan selanjutnya, Februari, diluncurkan buku *The Voyage to Marege* oleh C.C. Macknight yang bercerita tentang peradaban suku Bugis Makassar dalam pencarian teripang di perairan Australia. Peluncuran buku ini juga merupakan kerjasama antara Konsulat Jenderal Australia di Makassar dengan Penerbit Inninawa. Di akhir April tahun ini juga akan diadakan promosi makanan Australia yang dilangsungkan di Gelael Swalayan. Promosi ini menyediakan makanan kuliner khas Australia, juga ada cara memasak yang bagus dan aman serta seminar mengenai *food safety* agar masyarakat lebih paham mengenai pengolahan pangan dengan baik dan benar. Promosi barang dan jasa terkait Australia ini diharapkan mampu mengundang lebih banyak investor dari Australia untuk berinvestasi di Makassar dan juga menarik perhatian masyarakat Makassar untuk berlibur ke Australia.

Tidak hanya promosi budaya dan kuliner, tetapi kunjungan ke wilayah-wilayah Indonesia Timur juga aktif dilakukan oleh Konsulat Jenderal Australia di Makassar. Seperti pada bulan Juni tahun 2016, Konsulat Jenderal Australia di Makassar melakukan kunjungan ke beberapa kantor mitra Program MAMPU di Sulawesi Tenggara. Salah satunya adalah sekretariat Serikat PEKKA (Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga) Buton di Wolowa, Pulau Buton, Sulawesi Tenggara. Kunjungan tersebut bertujuan untuk mendengarkan secara langsung aktivitas dan perkembangan dari PEKKA. Kemudian di bulan November, Pemerintah Kota Ambon menerima kunjungan kerja dari Konsulat Jenderal Australia di Makassar. Kunjungan tersebut bertujuan untuk meningkatkan hubungan kerjasama dengan Pemerintah Australia melalui Konsulat Jenderal yang ada di Makassar, terutama di bidang pendidikan dan pariwisata. Apalagi, sudah lama terjalin hubungan yang baik antara Ambon dan Pemerintah Australia, yaitu pada hubungan *sister city* Darwin-Ambon.

Masih di tahun yang sama pada bulan Oktober, Konsulat Jenderal Australia juga mengunjungi Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Kunjungan yang bertujuan untuk melihat perkembangan pembangunan pada sektor pertanian, peternakan, dan pendidikan ini juga sekaligus mempromosikan beasiswa kuliah di Australia untuk S2 dan S3 serta membangun hubungan kerjasama yang erat antara Australia dan Kabupaten Sidrap. Selanjutnya di bulan November, Konsulat Jenderal Australia di Makassar mengunjungi DPRD Maluku dengan tujuan untuk membicarakan tawaran beasiswa Australian Awards di Australia. Hal ini

dilakukan karena pemenang beasiswa Australian Awards dari Maluku dan Maluku Utara masih sangat kurang dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain sehingga perlu diberlakukan pelatihan khusus terhadap pelamar beasiswa. Di bulan Desember, giliran Kota Tidore Kepulauan yang mendapat kunjungan dari Konsulat Jenderal Australia di Makassar. Kunjungan ini bertujuan untuk memperkenalkan Konsulat Jenderal Australia di Makassar yang telah dibuka secara resmi pada tanggal 22 Maret 2016 dan juga mempelajari tentang Pemerintah Daerah Kota Tidore untuk menjalin kerja sama di Bidang Ekonomi, Pertambangan, Perikanan dan Bidang Pendidikan.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Konsulat Jenderal Australia di Makassar sepanjang tahun 2016 hingga 2017, mulai dari yang telah terlaksana hingga yang belum terlaksana dirangkum pada tabel di bawah ini.

Tabel 1, Kegiatan Konsulat Jenderal Australia Sepanjang 2016

No.	Nama Kegiatan	Waktu	Keterangan
1.	Peresmian Konsulat Jenderal Australia di Makassar	Maret 2016	Terlaksana
2.	Visit to Ambon	Maret 2016	Terlaksana
3.	Promoting Australian Education in Kendari	Juni 2016	Terlaksana
4.	Kunjungan ke Kantor Mitra Program MAMPU di Sulawesi Tenggara	Juni 2016	Terlaksana
5.	Buka Puasa Bersama Anak Yatim Piatu	Juli 2016	Terlaksana
6.	Kunjungan ke BPBD Kota Makassar	Juli 2016	Terlaksana
7.	Pekan Budaya Penduduk Asli Australia 2016	Juli 2016	Terlaksana
8.	Lebaran Bersama Gubernur Sulawesi Selatan	Agustus 2016	Terlaksana
9.	Tomohon International Flower Festival	Agustus 2016	Terlaksana
10.	Temu Nasional Alumni Unhas	September 2016	Terlaksana
11.	Speaking to First Year Student at UMI	September 2016	Terlaksana
12.	Rehabilitasi Terumbu Karang di Pulau Badi	2016	Terlaksana
13.	Makassar International Eight Festival and Forum	September 2016	Terlaksana
14.	Visit Bone, Pangkep, dan Sidrap	Oktober 2016	Terlaksana
15.	Australian Goodwill Ship Visit to Makassar	Oktober 2016	Terlaksana
16.	Launching The School of The Sea di Pulau Salemo	2016	Terlaksana
17.	Konferensi AIBC di Perth: Peningkatan Optimisme dalam Hubungan Bisnis	2016	Terlaksana

18.	Kunjungan ke DPRD Provinsi Maluku	November 2016	Terlaksana
19.	Kunjungan ke Maluku Utara	Desember 2016	Terlaksana

Sumber: <http://makassar.consulate.gov.au/mksr/Blogintro.html>

Tabel 2. Kegiatan Konsulat Jenderal Australia Sepanjang 2017

No.	Nama Kegiatan	Waktu	Keterangan
1.	Festival Sinema Australia	Januari 2017	Terlaksana
2.	Peluncuran Buku <i>The Voyage to Marege</i>	Februari 2017	Terlaksana
3.	Kunjungan ke Kupang, Nusa Tenggara Timur	Maret 2017	Terlaksana
4.	Kunjungan ke Bajawa, Flores	Maret 2017	Terlaksana
5.	Kunjungan ke Dinas Peternakan Provinsi Sulawesi Selatan	Maret 2017	Terlaksana
6.	Promosi Makanan Australia di Gelael Swalayan	April 2017	Terlaksana
7.	Undangan Memperingati Hardiknas oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	Mei 2017	Terlaksana
8.	Pengiriman Delegasi Dinas Pariwisata Kawasan Timur Indonesia untuk Mengikuti <i>Short-Course</i> di Australia	September 2017	Belum Terlaksana

Sumber: <http://makassar.consulate.gov.au/mksr/Blogintro.html> dan Hasil Wawancara dengan Konsulat Jenderal Australia di Makassar.

Tidak hanya kota dan kabupaten yang dikunjungi oleh Konsulat Jenderal Australia di Makassar, namun juga berbagai lembaga dan instansi turut dikunjungi oleh Konsulat Jenderal Australia di Makassar. Contohnya adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar yang dikunjungi pada bulan Juli 2016. Kunjungan ini bertujuan untuk mendapatkan informasi perihal kesiapsiagaan Makassar dalam penanggulangan bencana sekaligus diskusi dan sharing pengetahuan serta pengalaman dalam hal kebencanaan, apalagi Kota Makassar sebagai wilayah pesisir dan memiliki beberapa pulau, perlu selalu diupayakan penanggulangan bencana dengan berbagai simulasi dan mitigasi bencana berbasis teknologi informasi. Selanjutnya di bulan Maret tahun 2017, Konsulat Jenderal Australia di Makassar juga mengunjungi Dinas Peternakan Provinsi Sulawesi Selatan. Kunjungan ini bertujuan untuk untuk menindaklanjuti kunjungan Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo bersama dengan Kadis Peternakan Sulsel Ir. Abd. Azis di Australia awal Februari lalu. Konsulat Jenderal Australia di Makassar bersedia membantu peternak yang ada di Sulsel dalam pengembangan sumber daya manusia bidang peternakan dan telah menyetujui beberapa poin kerjasama yang disepakati dengan konjen Australia, seperti yang disebutkan pengembangan SDM peternak dalam bidang pengembangan reproduksi atau pengetahuan tentang inseminasi buatan (kawin suntik).

Tidak hanya mengunjungi, namun Konsulat Jenderal Australia di Makassar juga kerap dikunjungi oleh berbagai lembaga maupun instansi. Seperti halnya Pengurus Asosiasi Business Development Services Indonesia (ABDSI) Korwil Sulawesi Selatan yang mengadakan kunjungan ke Konsulat Jenderal Australia di Makassar pada bulan Februari 2017, kunjungan ini dilakukan dalam rangka memperkenalkan keberadaan organisasi ABDSI dan peluang-peluang program yang bisa dikerjasamakan dan banyak membahas tentang pengembangan kewirausahaan dan pemberdayaan UMKM di Sulawesi Selatan.

Selain itu, Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo, juga turut mengunjungi Perth dan Sydney bersama 41 delegasi lainnya dari Sulawesi Selatan untuk membahas kerjasama antara Provinsi Sulawesi Selatan dengan Australia di bidang pendidikan, peternakan, dan pertanian. Sulawesi Selatan memang memiliki potensi yang besar pada ketiga bidang

tersebut, terutama di bidang pertanian dan peternakan. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan merasa perlu untuk belajar banyak dari Australia terkait bidang-bidang tersebut untuk kemudian diterapkan di Provinsi Sulawesi Selatan.

Keputusan pemerintah Australia untuk meresmikan Konsulat Jenderal Australia di Makassar telah membawa perubahan yang signifikan bagi hubungan kerjasama antara Indonesia dan Australia. Hal ini terlihat dari program-program yang dicanangkan oleh kedua negara semakin berkembang dan meluas sesuai dengan lingkungannya. Ke depannya, program-program tersebut diharapkan dapat membawa hubungan kerjasama Australia dan Indonesia, khususnya Kawasan Timur Indonesia, semakin maju dan meningkat.

5. KESIMPULAN

Pembukaan Konsulat Jenderal Australia di Makassar mendapatkan respon yang sangat positif dari berbagai stakeholder, baik dari masyarakat maupun pemerintah provinsi di Kawasan Timur Indonesia dan Pemerintah Kota Makassar. Hal tersebut ditandai dengan partisipasi aktif Konsulat Jenderal Australia dalam berbagai acara yang diadakan oleh pemerintah kota maupun berbagai bentuk pertemuan dan kerjasama yang telah dicanangkan oleh Konsulat Jenderal Australia di Makassar bersama dengan pemerintah, masyarakat, dan pelaku bisnis. Dilihat dari segi upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Australia setelah membuka Konsulat Jenderal di Makassar, Pemerintah Australia telah berhasil menyentuh hampir seluruh lapisan masyarakat yang ada di Kawasan Timur Indonesia.

Pada akhirnya, kehadiran Konsulat Jenderal Australia di Makassar telah membawa Australia dan Kawasan Timur Indonesia kepada sebuah babak baru. Tantangan demi tantangan akan dihadapi oleh kedua negara sehingga akan menimbulkan berbagai dinamika diantara keduanya. Segala bentuk hambatan akan ditemui, namun hambatan-hambatan yang akan terjadi tersebut tidak seharusnya menjadi penghalang bagi keduanya untuk menghentikan kerjasama, akan tetapi justru menjadi batu loncatan bagi kedua negara untuk mempererat hubungan. Dengan tetap mengacu kepada konsep kerjasama bilateral yang menjunjung tinggi kesamaan tujuan yang harus dicapai oleh kedua belah pihak, maka apapun hambatan yang akan terjadi ke depannya, Australia dan Kawasan Timur Indonesia akan selalu menjaga komitmennya dalam menciptakan hubungan yang lebih harmonis sebagai mitra kerjasama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Australia Government. (1993). *Australia's Relations with Indonesia*. Canberra: Australia Government Publishing Service.
- Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Departemen Luar Negeri Republik Indonesia. (2004). *Himpunan Keterangan Dasar Negara-Negara Akreditasi Perwakilan RI di Luar Negeri*. Jakarta: Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Departemen Luar Negeri Republik Indonesia.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan. (2016). *Statistik Ekspor Impor Sulawesi Selatan 2016*. Makassar: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan.
- Hadi Soesastro, A. B. (2005). *Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di Indonesia dalam Setengah Abad Terakhir*. Yogyakarta: Kanisius.
- Holsti, K. (1995). *International Politics: Framework and Analysis*. New Jersey: Prentice Hall.
- Juwondono. (1991). *Hubungan Bilateral: Definisi dan Teori*. Jakarta: Rajawali Press.
- Krisna, D. (1993). *Kamus Politik Hubungan Internasional*. Jakarta: Gramedia Pustaka
- Kusumahamidjojo, B. (1987). *Hubungan Internasional: Kerangka Studi Analisis*. Jakarta: Bina Cipta.
- Macknight, J. (2017). *The Voyage to Marege*. Makassar: Inninawa.
- Mackie, Jamie. (2007). *Australia and Indonesia Current Problems, Future Prospects*. New South Wales: Lowy Institute for International Policy.
- Peter Hess, C. R. (1997). *Economic Development: Theories, Evidence, and Policies*. Orlando: Harcourt Brace College Publishers.

- Riddell, R. C. (1991). *Economic Development*. Chicago: The University of Chicago Press Journals.
- Rix, A. (1993). *Japan's Foreign Aid Policy Reform and Aid Leadership*. London and New York: Routledge.
- Scott Burchill, A. L. (2015). *Teori-Teori Hubungan Internasional*. Bandung: Nusa Media.
- Sjamsumar Dam, R. (1995). *Kerja Sama ASEAN: Latar Belakang, Perkembangan, dan Masa Depan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sorensen, Georg dan Robert Jackson. (2009). *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Walter Carlsnaes, T. S. (2015). *Handbook Hubungan Internasional*. Bandung: Nusa Media.

Jurnal

- Dugis, Vinsensio M.A. 2015. Memperkokoh Hubungan Indonesia-Australia. Vol. 9 No. 2. Global & Strategis, Yogyakarta.
- Moravcsik, Andrew. (1993). Preferences and Power in the European Community: A Liberal Governmentalist Approach. Vol. 31 No. 4. Basil Blackwell Lt.d.
- Saputra, Tazrian Juniarto. (2013). Kerjasama United State Environmental Protection Agency (US - EPA) Indonesia dalam Peningkatan Kualitas Udara dan Kesehatan Publik (Studi Kasus Program Breathe Easy di Jakarta). Vol. 1 No. 2. ejournal.hi.fisip-unmul.org.
- Sy. Firmansyah, M. R. (2016). Kajian Pengembangan Pelabuhan Makassar dalam Menunjang Arus Bongkar Muat di Pelabuhan Makassar. Vol. 10 No. 1.
- Wijayanti, Yeni. (2016). Dinamika Hubungan Bilateral Indonesia-Australia Tahun 1945-1995. Vol. 1 No. 3. Jurnal Artefak.
- Zulkifli. (2014). Kerjasama Ekonomi Internasional sebagai Solusi Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara (Studi Kasus Indonesia). Vol. 3 No. 2.

Internet

- Admin. (2016). *Tingkatkan Kerjasama, Konsulat Jenderal Australia Kunjungi Pemkot Ambon*. Diambil kembali dari Pemkot Ambon: <https://www.ambon.go.id/tingkatkan-kerjasama-konsulat-jenderal-australia-kunjungi-pemkot-ambon/>. Diakses pada 3 April 2017.
- Ainun. (2016). *Konsul Jenderal Australia Kunjungi Tidore*. Diambil kembali dari Tidore Kota: <https://tidorekota.go.id/home/berita/436/konsul-jenderal-australia-kunjungi-tidore.html>. Diakses pada 3 April 2017.
- Australian Consulate General. (2016). *Australia Resmikan Konsulat Jenderal di Makassar, Sulawesi Selatan*. Diambil kembali dari Australian Consulate- General Makassar, Indonesia: <http://makassar.consulate.gov.au/mksrindonesian/home.html>. Diakses pada 8 November 2016.
- Australian Consulate General. (2016). *Australia Seru! Konsulat Jenderal Menyediakan Sate Sapi Australia dan Membuka Sydney Selfie Spot*. Diambil kembali dari Australian Consulate-General Makassar, Indonesia: http://makassar.consulate.gov.au/mksrindonesian/Australia_seru_8Fs_Festival.html. Diakses pada 3 April 2017.
- Australian Government - Department of Foreign Affairs and Trade. (2017). *Visiting Australia*. Diambil kembali dari Australian Government - Department of Foreign Affairs and Trade: <http://dfat.gov.au/about-australia/visiting-australia/Pages/tourism.aspx>. Diakses pada 22 Maret 2017.
- Australian Government: Department of Foreign Affairs and Trade. *ASEAN- Australia-New Zealand Free Trade Agreement*. Diambil kembali dari Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade: <http://dfat.gov.au/trade/agreements/aanzfta/Pages/asean-australia-new-zealand-free-trade-agreement.aspx>. Diakses pada tanggal 22 Maret 2017.
- Australian Government: Department of Foreign Affairs and Trade. *Indonesia- Australia*

- Comprehensive Economic Partnership Agreement*. Diambil kembali dari Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade: <http://dfat.gov.au/trade/agreements/iacepa/pages/indonesia-australia-comprehensive-economic-partnership-agreement.aspx#resources>. Diakses pada tanggal 22 Maret 2017.
- Australian Government: Department of Foreign Affairs and Trade. *Regional Comprehensive Economic Partnership*. Diambil kembali dari Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade: <http://dfat.gov.au/trade/agreements/rcep/Pages/regional-comprehensive-economic-partnership.aspx>. Diakses pada tanggal 22 Maret 2017.
- Australian Government: Department of Foreign Affairs and Trade. *Overview of Australia Aid's Program to Indonesia*. Diambil kembali dari Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade: <http://dfat.gov.au/geo/indonesia/development-assistance/Pages/development-assistance-in-indonesia.aspx>. Diakses pada tanggal 22 Maret 2017.
- Australian Government: Department of Foreign Affairs and Trade. *Effective Economic Institutions and Infrastructure in Indonesia*. Diambil kembali dari Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade: <http://dfat.gov.au/geo/indonesia/development-assistance/Pages/effective-economic-institutions-infrastructure-in-indonesia.aspx>. Diakses pada tanggal 22 Maret 2017.
- Australian Government: Department of Foreign Affairs and Trade. *Human Development for A Productive and Healthy Society in Indonesia*. Diambil kembali dari Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade: <http://dfat.gov.au/geo/indonesia/development-assistance/Pages/human-development-in-indonesia.aspx>. Diakses pada tanggal 22 Maret 2017.
- Australian Government: Department of Foreign Affairs and Trade. *An Inclusive Society Through Effective Governance in Indonesia*. Diambil kembali dari Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade: <http://dfat.gov.au/geo/indonesia/development-assistance/Pages/inclusive-society-in-indonesia.aspx>. Diakses pada tanggal 22 Maret 2017.
- Australia Indonesia Institute. (2016). *Geografi Australia*. Diambil kembali dari Australia Indonesia Institute: <http://dfat.gov.au/about-us/publications/people-to-people/geografi-australia/bab11/index.html>. Diakses pada 17 November 2016.
- Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Barat. (2014). *Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota, 2011-2015*. Diambil kembali dari Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Barat: <http://ntb.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/61>. Diakses pada 2 Mei 2017.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur. (2014). *Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur (Triwulanan) 2010-2016*. Diambil kembali dari Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Timur: <http://ntt.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/343>. Diakses pada 2 Mei 2017.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur. (2014). *Volume dan Nilai Ekspor Nusa Tenggara Timur Menurut Negara Tujuan, 2012-2014*. Diambil kembali dari Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Timur: <http://ntt.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/510>. Diakses pada 2 Mei 2017.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur. (2014). *Volume dan Nilai Impor Nusa Tenggara Timur Menurut Negara Asal, 2013-2014*. Diambil kembali dari Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Timur: <http://ntt.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/515>. Diakses pada 2 Mei 2017.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan. (2014). *Perkembangan Ekspor dan Impor Sulawesi Selatan 2017*. Diambil kembali dari Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan: https://sulsel.bps.go.id/website/brs_ind/brsInd-20170417163951.pdf. Diakses pada 2

Mei 2017.

- Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan. (2014). *Perkembangan Nilai Ekspor Sulawesi Selatan Menurut Negara Tujuan, 2011-2014*. Diambil kembali dari Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan: <https://sulsel.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/67>. Diakses pada 2 Mei 2017.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan. (2014). *Perkembangan Nilai Impor Sulawesi Selatan Menurut Negara Asal, 2011-2014*. Diambil kembali dari Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan: <https://sulsel.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/69>. Diakses pada 2 Mei 2017.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan. (2017, April 17). *Perkembangan Ekspor dan Impor Sulawesi Selatan 2017*. Diambil kembali dari Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan: https://sulsel.bps.go.id/website/brs_ind/brsInd-20170417163951.pdf. Diakses pada 2 Mei 2017.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah. (2014). *Volume dan Nilai Ekspor Sulawesi Tengah Menurut Negara Tujuan, 2013-2014*. Diambil kembali dari Badan Pusat Statistik Sulawesi Tengah: <http://sulteng.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/440>. Diakses pada 2 Mei 2017.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah. (2014). *Volume dan Nilai Impor Sulawesi Tengah Menurut Negara Asal, 2013-2014*. Diambil kembali dari Badan Pusat Statistik Sulawesi Tengah: <http://sulteng.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/438>. Diakses pada 2 Mei 2017.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara. (2014). *Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota, 2011-2015*. Diambil kembali dari Badan Pusat Statistik Sulawesi Tenggara: <https://sultra.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/85>. Diakses pada 2 Mei 2017.
- Bishop, Julie. (2016). *Konsulat Jenderal Australia di Makassar*. Diambil kembali dari Kedutaan Besar Australia Indonesia: http://indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/SM16_022.html. Diakses pada tanggal 16 November 2016.
- Dhina. (2016). *Konjen Australia di Makassar Kunjungi Serikat PEKKA di Pulau Buton, Sulawesi Tenggara*. Diambil kembali dari Kemitraan Australia- Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan: <http://www.mampu.or.id/id/photo/konjen-australia-di-makassar-kunjungi-serikat-pekka-di-pulau-buton-sulawesi-tenggara>. Diakses pada 3 April 2017.
- Florentin, V. (2016, Juli 1). *Kunjungan Wisatawan Mancanegara Naik 7,37 Persen*. Diambil kembali dari Tempo.co: <https://m.tempo.co/read/news/2016/07/01/090784788/kunjungan-wisatawan-mancanegara-naik-7-37-persen>. Diakses pada 2 Mei 2017.
- Julianto, Primo Alui. (2012). *Hubungan Indonesia - RI Terbaik Sepanjang Sejarah*. Diambil kembali dari Tabloid Diplomasi: <http://www.tabloiddiplomasi.org/previous-isuue/169-maret-2012/1366-hubungan-ri-australia-terbaik-sepanjang-sejarah.html>. Diakses pada tanggal 16 November 2016.
- Grigson, P. (2015). *Australia Hadir di Makassar*. Diambil kembali dari Kedutaan Besar Australia Indonesia: http://indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/SM15_051.html. Diakses pada 7 Mei 2017.
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. 2016. *Kerjasama Pariwisata Indonesia-Australia*. Diambil kembali dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia: <http://www.kemlu.go.id/id/berita/berita-perwakilan/Pages/Kerjasama%20Pariwisata%20Indonesia%20-%20Australia.aspx>. Diakses pada 22 Maret 2017.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan. (2017). *Profil Makassar*. Diambil kembali

- dari Direktorat Jendral Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: <http://ciptakarya.pu.go.id/profil/profil/timur/sulsel/makassar.pdf>. Diakses pada 7 Mei 2017.
- Padmasari, Salviah Ika. (2015). *2016, Australia Buka Konsulat di Makassar*. Diambil kembali dari Okezone News: <http://news.okezone.com/read/2015/12/02/18/1259757/2016-australia-buka-konsulat-di-makassar>. Diakses pada 8 November 2015.
- Panga, Nurhaya. (2016). *Konsulat Jenderal Australia di Makassar Diharapkan Operasional April 2016*. Diambil kembali dari antaranews.com: <http://www.antaranews.com/berita/541863/konsulat-jenderal-australia-di-makassar-diharapkan-operasional-april-2016>. Diakses pada 8 November 2016.
- Redaksi Portal HI. (2014). *Kerangka Hubungan Bilateral*. Diambil kembali dari Portal Hubungan Internasional: <http://portal-hi.net/kerangka-hubungan-bilateral>. Diakses pada 15 November 2016.
- Redaksi Siwalima. (2016). *Konjen Australia Datangi DPRD Maluku*. Diambil kembali dari SIWALIMA Portal Terbesar di Maluku: http://www.siwalimanews.com/post/konjen_australia_datangi_dprd_maluku. Diakses pada 3 April 2017.
- Ronalyw. (2016). *Australia Gagas Kerjasama Pemkab Sidrap*. Diambil kembali dari Berita KotaMakassar:<http://beritakotamakassar.fajar.co.id/berita/2016/10/08/australia-gagas-kerjasama-pemkab-sidrap/>. Diakses pada 3 April 2017.
- Samosir, Hanna Azarya. (2017). *Hubungan Benci tapi Rindu Indonesia-Australia*. Diambil kembali dari CNN Indonesia: <http://www.cnnindonesia.com/internasional/20170106202807-106-184674/hubungan-benci-tapi-rindu-indonesia-australia/>. Diakses pada 22 Maret 2017.
- Sumardi, Edi. 2017. *Konsulat Jenderal Australia Tayangkan Perdana 'Lion' di Makassar*. Diambil kembali dari Tribunmakassar.com: <http://makassar.tribunnews.com/2017/01/19/konsulat-jenderal-tayangkan-perdana-lion-di-makassar>. Diakses pada 3 April 2017.
- Tourism Australia Corporate Website. (2016). *International Tourism Snapshot as at 31 December 2016*. Diambil kembali dari Tourism Australia Corporate Website: http://www.tourism.australia.com/documents/Statistics/International_Tourism_Snapshot_September_2016_final_copy.pdf. Diakses pada 7 Mei 2017.
- Tourism Australia Corporate Website. (2017). *Visitor Arrivals Data*. Diambil kembali dari Tourism Australia Corporate Website: <http://www.tourism.australia.com/statistics/arrivals.aspx>. Diakses pada 7 Mei 2017.

Dokumen Resmi

- Republik Indonesia. 1976. *Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1976 tentang Pokok-Pokok Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 1982. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina Mengenai Hubungan Diplomatik Beserta Protokol Opsionalnya Mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan dan Pengesahan Konvensi Wina Mengenai Hubungan Konsuler Beserta Protokol Opsionalnya Mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan*. Sekretariat Negara. Jakarta